



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 03919 /MENPORA.D.III-1/VIII/2015
Sifat : PENTING/SEGERA
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : **Penganggaran NPC Daerah Pasca Pengunduran
dari NPC Pusat dari Anggota KONI**

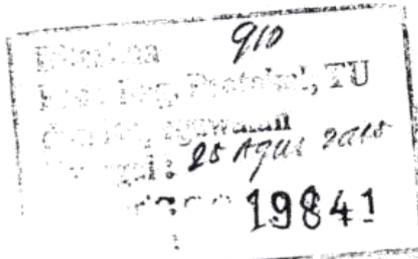
21 Agustus 2015

Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC) Sebagai Anggota KONI, dengan hormat kami sampaikan bahwa perkembangan organisasi keolahragaan *International Olympic Committee* (IOC) dan *Olympic Council of Asia* (OCA) yang menjadikan organisasi olahraga penyandang Disabilitas (Paralympian) menjadi organisasi yang mandiri dan berdiri sendiri, maka **Badan Pembinaan Olahraga Cacat** (BPOC) yang saat ini menjadi *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia telah menyatakan keluar dari keanggotaan KONI.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bahwa dalam perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga disetiap daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia menjadi membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga Disabilitas di daerah dan kedudukannya sederajat dengan KONI Provinsi.
- 2) Melakukan perencanaan anggaran tersendiri di luar anggaran KONI Provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan pengawasan penggunaannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Sesuai dengan kebijakan umum pemerintah terhadap persamaan hak-hak terhadap penyandang Disabilitas dengan atlet pada umumnya, maka di bidang olahraga diharapkan:
 - a. Hak yang diterima oleh atlet penyandang Disabilitas sama dengan atlet pada umumnya, baik penganggaran pembinaan organisasi, honor, vitamin serta bonus dari hasil kerja keras mereka disetiap kejuaraan adalah sama.
 - b. Memiliki porsi yang seimbang dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah.
- 4) Dengan kemandirian dan persamaan derajat dengan KONI diharapkan lebih memaksimalkan penggalian potensi/bibit olahragawan paralympian di daerah masing - masing untuk memperkuat olahraga prestasi paralympian kita di dunia Internasional.



- 5) Diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat membantu menganggarkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Disabilitas, serta kegiatan nasional maupun Internasional.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sosial;
4. KONI Provinsi;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, seluruh Indonesia.